

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
1. Lampiran Bagan PTUN	1
2. Buku Panduan <i>E-Court</i> Advokat	9
3. Buku Panduan <i>E-Court</i> Pengguna Lain	39
4. Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru	123
5. Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>)	127
6. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik	137
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 129/Kma/Sk/Viii/2019 Tentang Petunjuk Teknisi Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik	155
8. Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik	179
9. Perma Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Dan Atau Pejabat Pemerintahan	191
10. Perma Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara	207
11. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan	221
12. Perma Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Dan Atau Pejabat Pemerintahan	251
13. Perma Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang	264
14. Perma Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya	278
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : Kma/032/Skiv/2006 Tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan..	286
16. Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Penegasan Penyidikan Perairan Indonesia	290
17. Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus	292

18. Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara	294
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara	306
20. Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi Teknis Peradilan Perdata Umum 2007	320
21. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.....	482
22. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara	518
23. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.....	548
24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan	582
Daftar Pustaka	681
Glosarium	683
Indeks	685
Biodata Penulis	686